

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pendidikan menjadi sangat penting karena pendidikan memberikan perubahan, kreatifitas, sumber kreatifitas, sumber inspirasi dan yang paling penting adalah sebagai sumber ilmu. Pendidikan adalah titik awal dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai, sesuai dngan keinginannya. Jiwa manusia secara individual terbentuk kemampuan dasar yang disebut sebagai gregorius (naluri untuk hidup bermasyarakat), dengan naluri ini, tiap manusia secara individual ditinjau dari segi antropologi sosial disebut *homo socius* artinya makhluk yang bermasyarakat, saling menolong dalam rangka mengembangkan kehidupannya di segala bidang.

Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoritikal. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, namun cita-cita demikian tak mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan kemampuannya seoptimal mungkin, melalui proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan

menjadi cermin dari cita-cita kelompok manusia di satu pihak dan pada waktu bersamaan, pendidikan sekaligus menjadi lembaga yang mampu mengubah dan meningkatkan cita-cita hidup kelompok manusia sehingga tidak terbelakang dan statis.

Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara bertahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita.

Di sisi lain, di masa-masa krisis multidimensi saat ini, pendidikan menjadi barang yang dapat dikatakan mahal. Padahal pendidikan itu seharusnya dapat dinikmati oleh semua kalangan dan lapisan manusia, hanya sebagian yang beruntung yang dapat menikmati pendidikan, akibatnya tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan, karena faktor ekonomi salah satu penyebabnya, akhirnya menimbulkan masalah pendidikan diantaranya banyak anak usia sekolah yang putus sekolah kekurangan biaya pendidikan, beralihnya anak usia sekolah untuk memilih bekerja, untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Keadaan ini akan semakin buruk apabila dibiarkan saja, karena ujung-ujungnya akan menimbulkan penurunan kualitas pendidikan dan penurunan sumber

.....

pendidikan, mereka mengesampingkan pendidikan dan tidak memandang penting pendidikan karena mereka lebih mementingkan kebutuhan lainnya.

Melihat kondisi riil dalam masyarakat tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS ini dikeluarkan atas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang ditujukan di bidang pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini dimaksudkan sebagai solusi masalah pendidikan seperti anak putus sekolah dan sebagainya, akibat kekurangan biaya pendidikan. Program BOS ini sebagai bantuan kepada sekolah/madrasah/salafiah dalam rangka membebaskan iuran siswa. Sasaran BOS adalah semua SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB dan Salafiah setara SD dan SMP termasuk sekolah keagamaan non Islam baik negeri maupun swasta. Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional, sedangkan besarnya BOS untuk SD/MI/SDLB/Salafiah Rp. 235.000,-/siswa per tahun, dan SMP/MTs/SMPLB/Salafiah Rp. 324.500,-/siswa per tahun. Dana BOS ini boleh digunakan untuk uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan, biaya pemeliharaan sekolah, ujian sekolah, UUB dan UUH, membeli bahan-bahan habis pakai (buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktek), membayar biaya ringan, membayar daya dan jasa, honor guru, dan tenaga kependidikan honorer, kegiatan kesiswaan, memberi bantuan siswa miskin untuk transportasi, khusus untuk Salafiah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan peralatan ibadah.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya, berkaitan dengan pengimplementasian BOS tersebut, pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat kabupaten yaitu dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten<sup>2</sup> harus melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana di tingkat kabupaten, tanpa terkecuali di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung berusaha untuk mengoptimalkan di setiap program, salah satunya di bidang pendidikan, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas SDM, serta dalam kelancaran proses pendidikan. Kebijakan mengenai BOS ini diharapkan akan membantu dalam memecahkan masalah pendidikan seperti anak putus sekolah, agar dapat bersekolah kembali. Wilayah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 kecamatan, sasaran BOS ini adalah semua SD/MI/SDLB/Salafiah, SMP/MTs/SMPLB/Salafiah yang berada di seluruh kecamatan, Kabupaten Temanggung.

Dari sekian sasaran BOS yang meliputi jenjang SD dan SMP penulis memilih SMP sebagai objek penelitian, karena selama ini SMP lebih banyak memungut biaya operasional yang dibebankan kepada siswa, diharapkan dengan program BOS, pungutan biaya operasional yang dibebankan kepada siswa dapat berkurang.

Penulis mengambil sampel di SMP Negeri 1 Temanggung, karena SMP tersebut memiliki jumlah murid yang banyak dan SDM yang memadai. Jumlah murid yang banyak berarti kebutuhan operasional yang harus dipenuhi juga banyak

pengelolaan pelaksanaan BOS di SMP tersebut. SDM yang memadai dituntut dalam pengelolaan dan pelaksanaan dana BOS lebih optimal dan profesional.

Dari kondisi SMP tersebut, apakah dana BOS dapat berhasil diimplementasikan di SMP tersebut? Sehingga layak untuk diteliti.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Temanggung tahun 2005 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Temanggung.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Temanggung.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi masyarakat

Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam gambaran realisasi Bantuan Operasional Sekolah.

2. Manfaat bagi instansi terkait

Agar dapat diketahui apakah pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah sudah

## E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Di dalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut pendapat Koentjoroningrat :<sup>3</sup>

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”

Menurut pendapat Sofyan Effendi :<sup>4</sup>

“Teori adalah merupakan penelitian yang paling besar peranannya bagi peneliti, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alam yang menjadi pusat perhatiannya.”

Jadi teori merupakan sasaran pokok yang menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

### 1. Kebijakan

Secara Estimologis kebijakan berasal dari kata *Policy*, kata itu bisa diartikan sebagai kata politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijakan itu adalah merupakan proses politik. Proses kebijakan merumuskan masalah merupakan kegiatan yang pertama kali harus dilakukan oleh pembuat sebuah kebijakan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia Jakarta, 1991, hal. 11.

<sup>4</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, 1989, hal. 37

<sup>5</sup> Hoogerwery, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, 1983, hal. 4

W.I. Jenkin's (1978) merumuskan:

“Kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.”<sup>6</sup>

Miftah Thoha menyarakan kebijakan dalam arti luas ada 2 aspek pokok yaitu :

- a. *Policy* merupakan praktik sosial, ia bukan event tunggal dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan “daim” dari pihak-pihak konflik atau untuk menciptakan “incentive” bagi tindakan bersama dengan pihak-pihak yang menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keterkaitan dari pilihan-pilihan kolektif yang saling berganti, termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Dr. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 4

## 2. Implementasi Kebijakan

Menurut Amir Santoso, "Analisis Mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan/kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik diantara pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya bersifat akademis administrasi belaka tetapi melibatkan masalah-masalah politik, dengan demikian studi implementasi mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak berhenti hanya pada pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak berhenti hanya pada pertanyaan apa yang terjadi."<sup>8</sup>

Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai berikut : "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijaksanaan."<sup>9</sup>

Menurut Grindle (1980), membagi faktor-faktor implementasi kebijakan menjadi dua kelompok, yang berhasil tindakannya suatu kebijakan, pertama, berhubungan dengan isi (content) kebijakan dan yang kedua berhubungan dengan konteks lingkungan. Kedua faktor tadi dapat diketahui, apakah public policy sudah berjalan dengan baik artinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai disamping itu diketahui faktor-faktor penghambatnya sehingga perlu

---

<sup>8</sup> Amir Santoso, *Jurnal Ilmu Politik Suatu Pengantar*, Jakarta Gramedia, 1989 hal 8.

dicari strategi lebih lanjut yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijaksanaan.<sup>10</sup>

Dilihat dari *Context of Policy*, ada faktor penting yang tercakup didalamnya yang mempengaruhi kegiatan implementasi. Pertama kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi (*Interest Effected*) oleh kebijakan akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan-perubahan yang dituntut suatu kebijakan akan mengancam kepentingan tertentu, dalam masyarakat. Hal ini akan menentukan sikap dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan. Kedua, tipe keuntungan yang diperoleh dari kebijakan yang menjanjikan keuntungan yang jelas akan mudah memperoleh dukungan, sehingga akan lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Hal sebaliknya akan terjadi jika keuntungan yang kan diperoleh dari kebijakan sulit dipahami. Ketiga, luasnya perubahan-perubahan yang diharapkan, semakin luas perubahan yang diharapkan, semakin sulit dalam mengimplementasikannya. Demikian pula jika kebijakan diarahkan kepada jangkauan sasaran jangka panjang. Keempat, pusat-pusat pengambilan keputusan yang terpisah secara geografis dan organisasional, implementasi kebijakan akan semakin sulit. Kelima, pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan (*implementator*). Keaktifan keahlian dan dedikasi pelaksanaan akan berpengaruh selama proses implementasi. Keenam, sumber-sumber yang digunakan (*resource committed*). Implementasi kebijakan akan mudah digunakan jika didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan sebaliknya. Jika sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia, maka

---

implementasi akan terganggu dan secara langsung akan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan<sup>11</sup>

*Context of Policy* meliputi 3 faktor penting didalamnya. Pertama kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actor incaled*). Implementasi kebijakan dilaksanakan dalam suatu sistem politik tertentu yang melibatkan banyak kepentingan baik di pusat maupun di daerah, baik ditingkat politisi, birokrat, kekuatan-kekuatan sosial atau bisnis, dalam masyarakat masing-masing dalam kadar tertentu memiliki kekuatan, strategi sendiri-sendiri untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka, padahal masing-masing kepentingan tersebut seringkali bertentangan antar satu dan yang lainnya sehingga terjadi konflik kepentingan.

Kedua karakteristik lembaga atau rejim (*Instution and Rezim Characteristic*). Kebijakan publik dilaksanakan dalam suatu sistem politik tertentu dan dalam sistem ekonomi tertentu. Lembaga pelaksana juga mempunyai karakteristik tertentu yang bervariasi dan sebagainya. Semua itu saling berinteraksi membentuk lingkungan yang saling mendalam hal tingkat profesionalisme misi dan orientasi dalam mempengaruhi proses implementasi kebijakan, oleh karena itu karakteristik lembaga dan rejim serta interaksi berbagai kepentingan yang terjadi harus mendapat perhatian dan proses dalam analisis implementasi.

Ketiga, ketaatan dan daya tanggap (*compliance and Responsibility*). Keberhasilan implementasi kebijakan banyak ditentukan oleh konsistensi dan ketaatan para pelaksana kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan serta daya tanggap untuk memenuhi kebutuhan publik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana para aparat pelaksana mau dan mampu memahami tuntutan, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan yang berkembang di masyarakat dan berusaha melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana halnya Grindle, Mazmanian dan Sabtier juga menentukan berapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut dirangkum dalam tiga kategori, yaitu 1) *Tractability of the problem* (mudah tidaknya suatu masalah diselesaikan, 2) *Ability of statute to Structure Implementation* (kemampuan suatu perundang-undangan atau kebijakan menstrukturkan proses implementasi). 3) *Non statutory Variabel Afecting Implementation* (variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi) lebih lanjut kedua ahli tersebut terinci ketiga kategori diatas sebagai berikut.

- a. *Tractability of the problem*, meliputi : 1) kesulitan-kesulitan teknis, 2) keragaman perilaku dari kelompok target, 3) presentasi dari totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok target, 4) ruang lingkup perubahan-perubahan perilaku yang dikehendaki.
- b. *Variabel ability of statute to structure implementation*, sementara itu yang

- 1) Kondisi sosial dan teknologi
- 2) Dukungan publik
- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok yang terlibat.
- 4) Dukungan dari penguasa
- 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan dan pejabat pelaksana

Ahli lain, Van Meter dan Van Horn mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan
- d. Karakteristik pelaksana
- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- f. Disposisi pelaksana

Suatu implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil, karena pada prinsipnya suatu kebijakan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang ingin diimplementasikan sesuai yang diharapkan, dan sering menimbulkan kegagalan, serta muncul pertanyaan tentang sebab-sebab munculnya kegagalan tersebut berkaitan dengan isi kebijakan yang harus

Isi kebijakan dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya karena samar-samarnya isi kebijakan atau tujuan-tujuan dari isi kebijakan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan isi kebijakan.

Kebijakan yang ingin dijalankan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan yang lain. Ini merupakan salah satu penyebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain waktu, uang dan tenaga ahli. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi di antara aktor-aktor yang terlibat, struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini apabila pembagian dan wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai dengan pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

### **3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS – BBM) yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Program BOS ini dimaksudkan sebagai bantuan kepada Sekolah/Madrasah/Salafiah dalam rangka membebaskan iuran siswa, sedangkan sasaran BOS meliputi semua SD/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan salafiah setara SD dan SMP termasuk sekolah keagamaan non Islam baik negeri maupun swasta, tetapi khusus untuk sekolah swasta harus memiliki ijin

SD/MI/SDLB/ Salafiah per siswa, per tahun, dan Rp. 324.500,- untuk SMP/MTs/SMPLB per siswa, per tahun.<sup>12</sup>

## **F. Definisi Konsepsional**

Dilihat dari pemaparan teori di atas, maka dapat diambil suatu definisi konsepsional mengenai pengertian kebijakan, implementasi kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **1. Kebijakan**

Kebijakan adalah suatu keterkaitan dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakannya dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu sehingga dapat dilihat keberhasilannya.

### **3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Program BOS ini dimaksudkan sebagai bantuan kepada Sekolah/Madrasah/Salafiah dalam rangka membebaskan iuran siswa.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan atau memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel, dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan tentang bagaimana caranya mengukur variabel.

### **1. Implementasi Kebijakan**

a. Indikator ukuran dan tujuan kebijakan diukur melalui :

- 1) Berkurangnya atau bebasnya angka DO (Drop Out).
- 2) Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah
- 3) Lancarnya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

b. Indikator sumber daya dapat diukur :

- 1) Tersedianya fasilitas pendukung dalam pengimplementasian kebijakan.
- 2) Terciptanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut.
- 3) Tersedianya dana dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

c. Indikator komunikasi dapat diukur melalui :

- 1) Tingkat kejelasan mengenai isi dari kebijakan.
- 2) Ketepatan arah dan sasaran dari kebijakan.
- 3) Metode yang digunakan dalam pengimplementasian.

d. Indikator sosial, politik dan ekonomi dapat diukur melalui :

- 1) Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
- 2) Dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

e. Indikator sikap pelaksana dapat diukur melalui :

- 1) Pengetahuan dan kemampuan dari pelaksana.
- 2) Konsistensi pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3) Kreatifitas pelaksana dalam menjalankan tugas.

## II. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian, metodologi penelitian sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berpikir yang sistematis agar dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian.<sup>13</sup> Penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai tertujunya pada sesuatu pemecahan masalah yang ada pada masa yang sekarang dengan berusaha mencapai pemecahan masalah melalui analisa hubungan sebab akibat yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan sesuatu atau lembaga yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sunadi Suryobroto, "Metode Penelitian", Rajawali, Jakarta, 1992, hal. 18.

Ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- a. Memuaskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisa.

Tujuan dipergunakannya penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran dari suatu sifat-sifat individual, keadaan, gejala serta yang menerangkannya sebab masalah dari suatu gejala dengan lainnya dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## **2. Alasan Pemilihan Judul**

Daerah yang menjadi objek penelitian dari implementasi kebijakan BOS ini adalah SMP Negeri 1 Temanggung. Adapun alasan pemilihan SMP Negeri 1 Temanggung adalah :

- a. SMP Negeri 1 Temanggung memiliki jumlah murid yang banyak. Jumlah murid yang banyak berarti kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah yang harus dipenuhi banyak. Manajemen pengaturan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS juga harus lebih baik dan teliti.
- b. SMP Negeri 1 Temanggung memiliki SDM yang memadai. SDM yang memadai dituntut untuk lebih optimal dan profesional dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS.

Dari kondisi tersebut, SMP Negeri 1 Temanggung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional sekolah dan mampu melaksanakan

serta mengelola dana BOS dengan baik, maka layak untuk diteliti, untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan BOS di SMP tersebut.

### **3. Populasi dan Sampel**

Menurut Suharsini Arikunto adalah “ Jika kita hanya meneliti sebagian dari populasi maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagai wakil populasi dari yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Sampel yang baik adalah 10% dari jumlah populasi. ”<sup>16</sup>

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, yang sebagai sasarannya adalah murid dan wali murid SMP Negeri 1 Temanggung, dari jumlah populasi diambil sampel 10%, sehingga masing-masing menjadi 90 responden, dari murid dan wali murid sebagai sampelnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Kuesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh informasi yang relevan. Daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup yakni jawabannya ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi hak jawab.

Teknik ini sebagai alat untuk memperoleh data yang diperoleh langsung dari sumber. Responden yang dipilih adalah murid dan wali murid

SMP Negeri 1 Temanggung, yang masing-masing responden adalah 10% dari populasi, sehingga masing-masing menjadi 90 responden, dari murid dan wali murid, sebagai sampelnya.

b. Interview

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk memperoleh informasi, keterangan seseorang responden secara langsung melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Temanggung.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data tentang perkembangan pengimplementasian BOS di SMP Negeri 1 Temanggung.

## 5. Unit Analisis

- a. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Temanggung
- b. Bendahara BOS SMP Negeri 1 Temanggung
- c. Murid
- d. Wali Murid

## 6. Data dan Sumber Data

Oleh karena metode penelitian yang digunakan deskriptif dan analisis

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara kuesioner dan alat-alat lainnya. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari responden atau unit analisa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil/bahan kepustakaan.

Dari data primer dan sekunder maka penulis menganalisis secara logis dan sistematis.

## 7. Teknik Analisa Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul yang diperoleh dari responden kemudian diklasifikasikan secara logis jenis data dan kemudian disusun secara logis untuk menjawab pertanyaan.

Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>17</sup>

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan analisis data bersifat kualitatif maka, dibutuhkan data penelitian primer dan sekunder.